

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA KEPOLISIAN
DALAM MENDISIPLINKAN BERLALU LINTAS
(Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)**

Skripsi

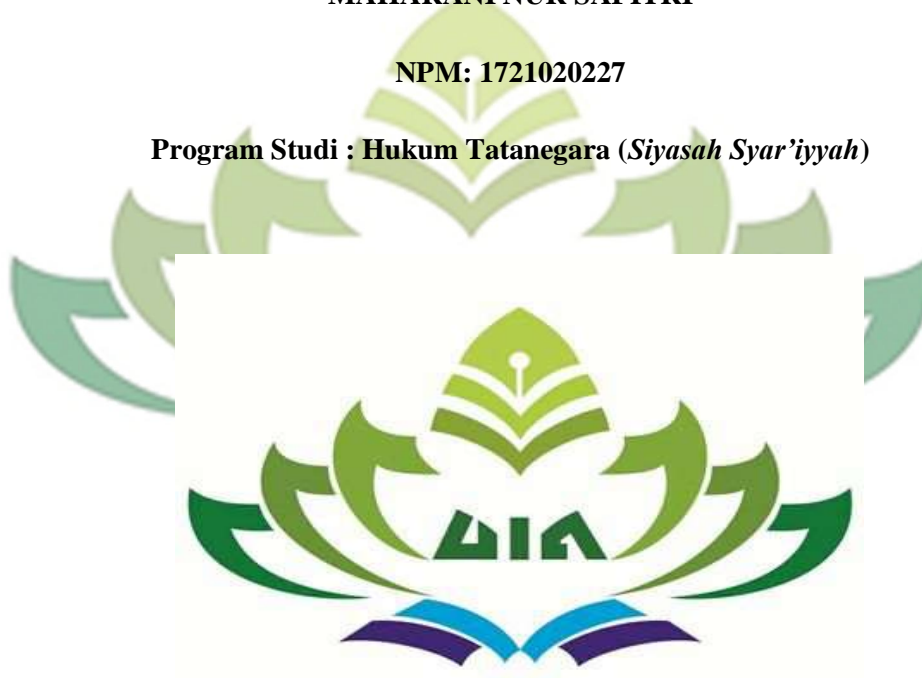
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

MAHARANI NUR SAFITRI

NPM: 1721020227

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

TAHUN 1443 H / 2021 M

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA KEPOLISIAN
DALAM MENDISIPLINKAN BERLALU LINTAS
(Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

MAHARANI NUR SAFITRI

NPM: 1721020227

Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal. S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Muhammad Irfan. S.H.I., M.Sy.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1443 H/2021 M

ABSTRAK

Pada prinsipnya setiap langkah manusia ada yang mengatur, begitu pula ketika berkendara di jalan raya. Banyak kendaraan yang berlalu lalang untuk segera sampai pada tujuan sehingga banyak sekali terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membahayakan banyak orang. Tindak lanjut amanat konstitusi tersebut adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang ini mengamatkan bahwa setiap pengguna kendaraan wajib mematuhi tata tertib yang ada, bahkan sosialisasi sudah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas guna menciptakan suasana yang tertib berlalu lintas. Analisis efektivitas dari Polres Lampung Tengah masih banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat. Terutama kurangnya fasilitas jalan yang memadai, yaitu jalan yang harus dibenahi kurangnya Sarana dan prasarana jalan berlubang dan lampu apil tidak beroperasi.

Berdasarkan penelitian yang menjadi rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah dan yang kedua, Bagaimana Upaya Kepolisian Resor Kabupaten Lampung Tengah dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah Perspektif Hukum Islam.

Penulis skripsi ini digunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung di lapangan atau kepada responden secara langsung dengan cara Observasi, Dokumentasi dan Wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif yaitu mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel, di Polres Lampung Tengah.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peraturan yang menyangkut kewajiban konsentrasi berkendara masih sering dilanggar oleh pengendara. Akan tetapi peneliti menemukan adanya kekurangan dalam memfasilitasi jalan dan lampu apil di jalan tidak beroperasi. Peneliti merekomendasi kepada Pemerintah Daerah dan Jasa Raharja untuk lebih memperhatikan fasilitas jalan agar masyarakat merasa aman dalam berkendara dan mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis permasalahan dapat ditarik kesimpulan bahwa, dibentuknya peraturan tersebut semata-mata demi kemaslahatan bagi pengendara sepeda motor serta pengguna jalan lainnya.

Kata Kunci : Disiplin Berlalu Lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukrame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Jurusan Syiasah Syar'iyah fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung menyatakan bahwa:

Nama : Maharani Nur Safitri
Npm : 1721020227
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)**". adalah benar-benar merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan duplikasi ataupun saluran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila lain waktu dibuktikan adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat agar dapat dipertanggung jawabkan.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021

Penulis



Maharani Nur Safitri

1721020227



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul : Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian
Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi Kasus di
Kepolisian Resor Lampung Tengah)
Nama : Maharani Nur Safitri
NPM : 1721020227
Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. Liky Faizal, S.Sos, M.H.
NIP. 197611042005011004

Pembimbing II

Muhammad Irfan, S.H.I, M.Sy
NIP. 2014080919850508155

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki M.S.I

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jalan Letkol. H.Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Tlp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)"** disusun oleh Maharani Nur Safitri, NPM 1721020227, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah diajukan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Rabu 1 Desember 2021.

Tim Penguji

Ketua : Frenki, M.Si

Sekretaris : Erik R Gumiri, M.H

Penguji I : Marwin, S.H., M.H

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H

Penguji III : Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr.H.A. Kumedj Ja'far, S.Ag., M.H.

NIP. 19720862003121002

MOTTO

يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

(QS. An-nisa (4) : 59)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua oarang tuaku, Ayahanda Anwar Fansyuri dan Ibunda Martini tercinta yang telah melindungi, mengasuh, menyayangi dan mendidik saya sejak dari kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restunya penulis dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini merupakan hadiah terindah untuk kedua orang tua saya.
2. Adikku tercinta yang selalu memberikan dukungan serta motivasinya dan yang menjadi sumber inspirasiku yaitu Fakhri Kurnia Saputra dan Septian Rizky Ramadhan.
3. Teman-temanku Khoiri Muzamil, Raharti, Anggi Febriyani, Rian Andrianto, Dwi Patmawati, Lukman, Devi Oktavia dan seluruh teman temanku jurusan siyasah angkatan 2017 kelas C yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama penyusunan skripsi.
4. Almamater Tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Maharani Nur Safitri dilahirkan di Gunung Madu pada tanggal 16 Januari 1999, merupakan anak pertama dari tiga bersaudara putra pasangan Bapak Anwar Fansyuri dan Ibu Martini.

Penulis menyelesaikan pendidikan di :

1. SD Negeri 1 Gunung Madu, Kabupaten Lampung Tengah diselesaikan tahun 2011
2. Mts Ma'arif NU5 Sekampung, Kabupaten Lampung Timur diselesaikan tahun 2014
3. SMK Kesehatan Cendikia Husada, Kabupaten Lampung Utara diselesaikan tahun 2017
4. Tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Pada Fakultas Syari'ah Pada Program Studi Siyasah (Hukum Tatanegara) melalui jalur UMPTKIN.



Bandar Lampung, 15 Desember 2021

Penulis

Maharani Nur Safitri

1721020227

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplin Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)”**. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H). Pada program studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sang pelita kehidupan, seiring berjalan menuju ilahi, Nabi Muhammad SAW. Serta kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya kelak di hari akhir nanti kita diakui sebagai umatnya, aamiin.

Kata terimakasih tiada hentinya untuk Ayah dan Ibu yang tiada putusnya dalam mendoakan, memberikan kasih sayang dan memberikan semangat kepada penulis yang telah banyak berkorban untuk penulis selama ini. Dengan penuh kerendahan hati tentunya penulis sangat menyadari bahwa masih sangat banyak kekurangan dan hambatan juga kesulitan namun berkat bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Maka dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Bapak Dr.H.A. Kumedhi Ja'far,S.Ag.,M.H, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Frenki, M.S.I, Selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) yang telah memberikan penghargaan dan juga bantuan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos.,M.H, Selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy, Selaku Pembimbing II yang telah banyak memotivasi dan meluangkan waktu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Khususnya Program Studi Hukum Tatanegara, atas ilmu dan didikan yang telah diberikan.
7. Ayah dan Ibu yang selalu mendukung setiap langkahku serta doa yang tak pernah berhenti dihaturkan disetiap sujudmu.
8. Teman-teman seperjuangan dari jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*) tahun angkatan 2017, khususnya kelas C Hukum Tatanegara, terimakasih atas kebersamaan dan juga dukungannya selama ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga dan terjalin dengan baik.

Semoga segala bimbingan dan juga bantuan serta perhatian yang telah diberikan mendapatkan balasan dan dihitung sebagai amal ibadah disisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan juga saran yang sifatnya membangun dari para pembaca demi penyempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya masyarakat umumnya. Amin Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, 15 Desember 2021

Penulis

Maharani Nur Safitri

1721020227



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Fokus dan Sub Fokus.....	7
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Disiplin Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009	
1. Tugas dan Wewenang Kepolisian	19
2. Pengertian Lalu Lintas.....	20
3. Pengertian Disiplin Berlalu Lintas.....	23
4. Aspek-aspek Kedisiplinan Berlalu Lintas.....	25
B. Disiplin Berlalu Lintas Menurut Hukum Islam	
1. Tata Cara dan Etika Berkendara Menurut Hukum Islam	28
2. Etika Berkendara Menurut Hukum Islam	32
3. Keselamatan Berkendara Menurut Hukum Islam	33
4. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	38
5. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	40

	6. Penerapan Hukum Islam di Jalan Raya	44
BAB III	DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
	A. Gambaran Umum Kepolisian Resor Lampung Tengah	47
	B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan	53
	C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Resor Lampung Tengah.....	69
BAB IV	ANALISIS PENELITIAN	
	A. Implementasi Disiplin Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah.....	73
	B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Disiplin Berlalu Lintas	75
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Rekomendasi	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Tengah
Lampiran 2	Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Kepolisian Resor Lampung Tengah
Lampiran 3	Pedoman Wawancara
Lampiran 4	Turnitine
Lampiran 5	Blangko Konsultasi Skripsi

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah
Tahun 2020

Tabel 2. Data Kecelakaan Penyebab Faktor Berdasarkan Pengemudi

Tabel 3. Data Kecelakaan Penyebab Faktor Berdasarkan Alam

Tabel 4. Data Kecelakaan Penyebab Faktor Berdasarkan Jalan

Tabel 5. Data Kecelakaan Penyebab Faktor Berdasarkan Kendaraan



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Kepolisian Resor Lampung Tengah



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran 2 Surat Riset

Lampiran 3 Pedoman Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara

Lampiran 5 Gambar Penelitian

Lampiran 6 Turnite

Lampiran 7 Blangko Konsultasi Skripsi





BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum melangkah pada pembahasan yang lebih mendalam. Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman didalam mengartikan judul skripsi ini, akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi ini: “ Perspektif Hukum Islam Tentang Upaya Kepolisian Dalam Mendisiplinkan Berlalu Lintas (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah) “ yang sebagai berikut :

1. Perspektif Hukum Islam

- a. Perspektif adalah konteks sistem dari persepsi visual melalui sudut pandang untuk melukiskan suatu objek atau masalah berdasarkan sifat atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.¹
- b. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang di dasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.²

2. Kepolisian

Kepolisian adalah lembaga negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³

3. Disiplin Berlalu Lintas

- a. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang harus tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.⁴
- b. Berlalu Lintas adalah sesuatu yang berkenaan dengan lalu lintas yang perlu dipatuhi bagi setiap orang.⁵

4. Kepolisian Resor Lampung Tengah

- a. Kepolisian Resor adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten atau kota.⁶
- b. Lampung Tengah terletak pada kedudukan 104°35' bujur timur sampai 105°50' bujur timur dan 4°30' lintang selatan sampai 4°15' lintang selatan.
 - 1) Sebelah Utara dengan Tulang Bawang dan Lampung Utara
 - 2) Sebelah Selatan dengan Pesawaran
 - 3) Sebelah Timur dengan Lampung Timur dan Kota Metro
 - 4) Sebelah Barat dengan Tanggamus dan Lampung Barat

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam tingkat efektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan dan Lalu Lintas, oleh sebab itu peneliti memutuskan untuk melaksanakan

¹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 81.

² Iryani Eva, “Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017).

³ Sajipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 111

⁴ A.S Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 94.

⁵ Ibid, 85

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

penelitian di Kepolisian Resor Lampung Tengah yang bertujuan untuk mengetahui polres tersebut apakah sudah mencapai efektif dalam menyelenggarakan disiplin dalam berlalu lintas ataukah belum. Disinilah penulis perlu melakukan penelitian mendalam sesuai dengan judul yang diteliti.

B. Latar Belakang Masalah

Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja dan salah satu penyebab utama kematian di dunia. Menurut data *Global Status Report Safety* lebih dari 1,2 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat kecelakaan lalu lintas, dengan jutaan lebih mendapatkan cedera serius. Apabila dirata-ratakan, maka sekitar 100 ribu orang meninggal dunia setiap bulannya akibat kecelakaan lalu lintas. Secara global, kecelakaan lalu lintas adalah penyebab utama kematian dikalangan anak muda. Pada tahun 2020, angka korban meninggal di dunia akibat kecelakaan lalu lintas diprediksi dapat mencapai 1,9 juta apabila tidak ada langkah nyata yang diambil untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas.

Tingginya angka kecelakaan kendaraan roda dua dan roda empat bukanlah permasalahan yang tergolong baru di Indonesia. Dari sejumlah data yang ada menyebutkan bahwa jumlah kasus korban luka dan korban tewas akibat kecelakaan lalu lintas di jalan raya terus meningkat setiap tahunnya. Rata-rata 30 ribu orang tewas akibat kecelakaan di jalan raya pertahun atau 82 orang per hari. Diperinci lagi, rata-rata dua orang tewas per jamnya akibat kecelakaan, secara nasional rata-rata terjadi 10 ribu kecelakaan lalu lintas setiap tahunnya. Pada tahun 2015 Indonesia menjadi negara ketiga di Asia di bawah Tiongkok dan India dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi di dunia dengan total kematian 38.279 kematian.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Lampung Tengah kasus kecelakaan lalu lintas (lakalantas) dapat diperoleh informasi bahwa angka kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Pada tahun 2020 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas cukup tinggi 303 kasus kecelakaan lalu lintas atau sekitar 35 kasus perbulannya. Angka kecelakaan tersebut adalah angka kecelakaan yang tercatat saja (*Report accidents*). Dari data tersebut maka diperlukan adanya upaya untuk mengurangi jumlah kecelakaan. Untuk itu perlu adanya antisipasi agar tidak terjadi peningkatan kecelakaan lalu lintas pada tahun berikutnya.

Setiap orang yang terlibat kecelakaan lalu lintas pastinya akan dilakukan penyelidikan terhadap kecelakaan tersebut. Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas ringan, sedang maupun berat, pihak yang menyebabkan kecelakaan wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan atau biaya pemakaman dengan tidak mengugurkan tuntutan perkara pidana. Jumlah ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Peristiwa mengenai lalu lintas adalah adanya

ketidaksinambungan antara jumlah kendaraan dengan fasilitas jalan yang ada, terutama mengenai perluasan jaringan jalan raya.⁷

Kepadatan jalan raya yang tidak diimbangi dengan pengetahuan untuk berkendara dapat menimbulkan kecelakaan dan juga dapat disebabkan karena kondisi jalan yang kurang baik. Kerusakan jalan ini berupa retak-retak (*cracking*), jalan bergelombang (*corrugation*), kerusakan berupa alur cekungan arah melebar dan memanjang jalan sekitar jarak roda kendaraan (*rutting*), serta jalan berlobang (*pothole*). Kerusakan jalan tersebut tidak hanya berada pada pinggir jalan, melainkan kerusakan jalan yang sering dijumpai hampir dari pinggir jalan hingga ada yang di tengah jalan. Kerusakan jalan di banyak tempat akan menyebabkan semakin tingginya angka kecelakaan terutamapada pengguna sepeda motor.

Utamanya, tujuan dalam berkendara diharuskan memiliki kosentrasi berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 106 yakni :*“Setiap orang mengemudikan kenderaan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh kosentrasi”*.⁸ Tapi pada kenyataannya ditemukan dilapangan banyak orang yang mengemudikan kendaraannya tidak penuh kosentrasi, sehingganya banyak orang mengalami kecelakaan karena kurang hati-hati dalam berkendara. Salah satu penyebabnya adalah dibawah pengaruh minuman keras, bermain handphone saat berkendara, dan mengobrol saat mengendari kendaraan di jalan raya.

Sesuai dengan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan “penuh kosentrasi” adalah setiap orang (yang sudah memenuhi syarat dalam berkendara) yang mengemudikan kenderaan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan. Kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi seringkali diakibatkan oleh tidak adanya kosentrasi penuh pengendara sepeda motor dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan berlalu lintas.

Namun pada kenyataannya, kurang sesuai dengan apa yang diharapkan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini yang mana kasus kecelakaan lalu lintas masih sering terjadi diakibatkan oleh tidak adanya konsentrasi penuh pengendara dalam mengemudikan kendaraannya sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan berlalu lintas bagi pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, untuk menggali lebih lanjut hal ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat dan mengulasnya dalam skripsi ini dengan judul: **“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG UPAYA KEPOLISIAN RESOR DALAM MENDISIPLIN BERLALU LINTAS (Studi di Kepolisian Resor Lampung Tengah)”**.

⁷Soerjono Soekanto, *Investarisasi Dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984), 2.

⁸Pasal 106 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada kecelakaan lalu lintas di wilayah Polres Gunung Sugih, untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas terhadap pengguna kendaraan roda empat dan roda dua yang terdapat pada pasal 106 dan 283 tentang konsentrasi berkendara menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan dikarenakan kurang kesadaran dari masyarakat, pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, dan kurangnya fasilitas jalan. Penulis melakukan penelitian berlokasi di wilayah Polres Lampung Tengah. Adapun sub focus dari penelitian ini adalah :

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif Hukum Islam.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Disiplin Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Disiplin Berlalu Lintas?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Disiplin Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah
2. Untuk Mengetahui Perspektif Hukum Islam Terhadap Disiplin Berlalu Lintas di Kabupaten Lampung Tengah

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai hukum islam mengenai pelaksanaan disiplin berlalu lintas yang diharapkan mampu memperluas pemahaman ilmu pengetahuan dalam artian yang membangun.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum di jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan telaah yang dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan penulis melihat ada yang membahas tentang lalu lintas seperti pada skripsi dibawah ini yaitu:

1. Skripsi karya Armansyah yang berjudul "Dampak negatif dan sanksi pemakaian telepon seluler pada saat mengemudikan kendaraan analisis pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Hukum Islam". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak negative dan sanksi dari pemakaian telepon seluler pada

saat mengemudikan kendaraan di jalan raya dan untuk meningkatkan kewaspadaan kepada para pengemudi kendaraan agar lebih berhati-hati dalam menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang diangkat penulis yaitu terletak pada kecelakaan lalu lintas akibat kurangnya konsentrasi masyarakat, adapun perbedaannya yaitu penelitian ini mengetahui dampak negative telepon seluler sedangkan penulis penyebab kecelakaan disebabkan karena fasilitas jalan yang kurang memadai.⁹

2. Hasil penelitian Rosdiana Harahap “Analisis fiqh siyasah mengenai disiplin berlalu lintas menurut pasal 107 ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 dalam perspektif kemaslahatan studi kasus di jalan pasar VII Tembung/Simpang Jodoh”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari pasal 107 ayat 2 bagi masyarakat baik dari segi kecelakaan maupun sanksi. Hasil dari penelitian ini adalah menyalakan lampu utama sepeda motor dapat menghindarkan kecelakaan lalu lintas karena dengan menyalakan lampu utama kendaraan maka pengendara lain yang berada di depannya akan lebih cepat melakukan reaksi sehingga pengendara dapat memberikan jarak di jalan ataupun setidaknya dapat mengurangi tingkat kemacetan. Berdasarkan penelitian ini, terdapat persamaan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian masyarakat, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menyalakan lampu utama pada siang hari sedangkan penelitian penulis penerapan disiplin lalu lintas di jalan raya.¹⁰
3. Skripsi penelitian Adji Bagas Putra Koneri “Penegakan hukum pidana pelanggaran pasal 106 jo pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kota Palembang”. Dalam penelitian ini membahas penegakan hukum pada pasal 283 UULAJ tidak menimbulkan efek jera kepada masyarakat dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia pada umumnya masih terhadap paradigma akan patuh kepada hukum itu jika hukum dianggap sebagai petugas. Persamaan dalam penelitian ini yaitu terdapat pada pasal 106 dan 283 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pelanggarannya sedangkan penulis membahas akibat dari pelanggaran terjadi kecelakaan lalu lintas.¹¹
4. Jurnal ilmiah penelitian karya H. Muhammad Badri yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi”. Persamaan penelitian ini pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan

⁹Armansyah, “Dampak Negatif Dan Sanksi Pemakaian Telepon Seluler Pada Saat Mengemudikan Kendaraan Analisis Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menurut Hukum Islam” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

¹⁰Rosdiana Harahap, “Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Menurut Pasal 107 Ayat 2 UU No.22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan Studi Kasus Di Jalan Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019), 101.

¹¹Adji Bagas Putra Koneri, “Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 Jo Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Palembang” (Universitas Sriwijaya, 2018), 8.

lalu lintas, sedangkan perbedaannya yaitu penegakan hukum pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia.¹²

5. Jurnal karya Elsanias Natasya Susilo yang berjudul “Penegakan hukum terhadap pengguna gps saat mengendarai kendaraan”. Dalam penelitian ini persamaannya menegakkan hukum pasal 106 UULAJ, sedangkan perbedaannya jurnal ini membahas saat mengendarai kendaraan bermotor yang memakai *handphone* itu termasuk pelanggaran lalu lintas yang terdapat pada pasal 106 ayat (1) UULAJ yang berupa ancaman yaitu sanksi dan pidana dalam pasal 283 UULAJ saat mengoperasikan sebuah aplikasi yaitu gps yang ada di *handphone* pada saat melakukan perjalanan merupakan aktivitas yang berbahaya sehingga diperlukannya e-tilang agar mengurangi driver yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan menjadi lebih efektif untuk kepolisian dalam menegakkan hukum.¹³

Berdasarkan tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu, terdapat perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis. Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dan penelitian terdahulu adalah bahwa penelitian ini berfokus pada hukum Islam mengenai disiplin berlalu lintas di Kepolisian Resor Lampung Tengah yang berfokus pada pasal 106 dan pasal 283 UULAJ.

H. Metode Penelitian

Dalam rangka penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan, dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya.¹⁴ Karena penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan, maka dalam pengumpulan data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian).

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris yang dimaksud dengan metode empiris adalah penelitian hukum yang termasuk dalam penelitian hukum empiris dengan bentuk evaluatif yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dan dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.

¹²H Muhammad, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Di Wilayah Hukum Polresta Jambi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 16, no. 1 (2016): 27.

¹³Natasya Elsanias Susilo, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Gps Saat Mengendarai Kendaraan,” *Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2020): 204.

¹⁴Hadi Sutrisno, *Metode Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994), 142.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang digunakan peneliti untuk memperoleh jawaban atas masalah penelitian yang sedang dikaji. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui wawancara (interview).¹⁵ Data yang diambil berhubungan langsung dengan objek yang akan diteliti dan digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer diperoleh dari hasil dokumentasi dari interview yang dilakukan peneliti. Penelitian skripsi ini dilakukan di Kepolisian Resor Lampung Tengah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data penunjang penelitian yang diperoleh dari berbagai sumber untuk melengkapi penelitian. Data sekunder diperoleh dalam bentuk sudah jadi (tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan atau berbagai jurnal dan penelitian lain yang telah dilaksanakan sebelumnya.¹⁶ Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan alat transportasi umum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.¹⁷ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 467 kecelakaan lalu lintas pada tahun 2020.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang telah diteliti, apabila jumlah responden kurang dari 100, sampel diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Sedangkan jika jumlah responden lebih dari 100, maka pengambilan sampel 10%, 15%, 20%, dan 25%.¹⁸ Karena populasi dalam penelitian ini 100 yaitu berjumlah 467 kecelakaan lalu lintas maka sampel diambil 25%, jadi sampel dalam penelitian ini adalah $467:25 = 18$ orang, maka sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 orang, maka peneliti mengambil 1 Polisi Unit Laka, 1 Polisi Lalu Lintas, dan 16 masyarakat yang pengguna jalan di daerah Kabupaten Lampung Tengah. Maka teknik

¹⁵Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, 1st ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 250.

¹⁶Uma Sukarna, *Metode Analisis Data* (Jakarta: Kencana, 2007), 26.

¹⁷Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), 115.

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 109-112.

pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan teknik random sampling, simple random sampling adalah metode penarikan dari sebuah populasi dengan cara tertentu sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020 dikarenakan pada tahun 2020 sering terjadi kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lampung Tengah, kemudian diatas tersebut dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah suatu pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih saling berhadapan secara fisik yang diarahkan pada pokok permasalahan tertentu.²⁰ Penelitian ini menggunakan wawancara secara bebas, yaitu dengan menyiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah ditentukan dan yang berkaitan dengan permasalahan.

b. Observasi

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.²¹ Dalam penelitian ini yang dimaksudkan untuk mengamati secara langsung objek-objek yang diteliti yang berada dilapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variabel yang berbentuk tulisan atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa dokumen, transkrip, surat kabar, majalah, jurnal, catatan serta buku-buku yang ada hubungannya dengan tema penelitian.²² Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis gunakan untuk memperoleh data tentang disiplin berlalu lintas di Kepolisian Resor Lampung Tengah.

5. Pengolahan Data

Data-data yang relevan dengan judul ini terkumpul, kemudian diatas tersebut diolah dengan cara:

a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian dilapangan ataupun dari literatur.²³

¹⁹Kerlinger, *Asas-Asas Penelitian Behaviour* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), 188.

²⁰Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2006), 72.

²¹AS Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), 114.

²²ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit Tras, 2009), 57.

²³Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Bandung: PT.Grafindo Persada, 2010), 56.

- b. Rekontruksi data (*rekontrucing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁴

6. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menghasilkan data deskriptif yaitu menggunakan studi kasus merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk mempelajari secara mendalam dan juga menggunakan suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci.²⁵ Pengolahan analisis data ini akan digunakan metode analisis yaitu metode befikir induktif, yaitu berangkat dari fakta yang khusus atau peristiwa yang kongkrit kemudian fakta atau peristiwa yang khusus itu ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.

Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang kemudian mengambil sebuah kesimpulan yang bersifat umum. Metode ini yang akan dipergunakan untuk menyaring atau menimbang data yang terumpul, dan dengan metode ini juga data dianalisis sehingga didapatkan jawaban yang benar.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibuat sistematika yang diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang dimana setiap bab mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara umum gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN memaparkan latar belakang masalah, pengambilan masalah yang akan dijadikan fokus utama dalam penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dilakukan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan, metode yang dilakukan dalam penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI memaparkan landasan teori untuk menggambarkan posisi penelitian yang dilakukan terhadap hasil penelitian lain.

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN memaparkan hasil penelitian yang dilakukan, gambaran umum objek yang diteliti, penyajian data penelitian disertai dengan pembahasan yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang disusun.

BAB IV ANALISIS PENELITIAN memaparkan analisis data penelitian dan temuan yang dilakukan penelitian.

BAB V PENUTUP memaparkan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan saran untuk pembaca maupun peneliti selanjutnya yang berminat.

²⁴ Amirullah and Abidin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

²⁵ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sirasi, 1996), 38.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Disiplin Berlalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

1. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pada prinsipnya tugas-tugas Kepolisian secara menyeluruh adalah sama yaitu melakukan perlindungan, melakukan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum dan memelihara tata tertib. tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu :²⁶

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- f. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
- h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas Polisi
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan pihak yang berwenang
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Cetakan 1, PT.Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, 17

2. Pengertian Lalu Lintas

Menurut Djajoesman, Bahwa Secara Harfiah Lalu Lintas Diartikan Sebagai Gerak (bolak balik) manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.²⁷ Sedangkan menurut Poerdawarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak.²⁸

Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya, yang mana pengertian lalu lintas itu sendiri diatur dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan khususnya pada pasal 1 ayat (1).²⁹ Untuk lalu lintas itu sendiri terbagi atas laut, darat dan udara. Lalu lintas sendiri merupakan sarana transportasi yang dilalui bermacam-macam jenis kendaraan, baik itu kendaraan bermesin roda dua atau beroda empat pada umumnya dan kendaraan yang tidak bermesin, contohnya sepeda, becak dan lain-lain.

Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah merupakan suatu dasar hukum terhadap pemberlakuan kegiatan lalu lintas ini, dimana makin lama makin berkembang dan meningkat sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat. Kalau ditinjau lebih lanjut tingkah laku lalu lintas ini ternyata merupakan suatu hasil kerja gabungan antara manusia, kendaraan dan jaringan jalan. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas dan jalan.³⁰

Lalu lintas dan Angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan yaitu :

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan mode angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- b. Terwujudnya etika lalu lintas dan budaya bangsa.
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan. Pergerakan tersebut dikendalikan oleh seseorang menggunakan akal sehatnya mengemudikan kendaraan di jalan, akan mengakibatkan bahaya bagi pemakai jalan yang lain. Demikian juga hewan di jalan tanpa

²⁷Djajoesman, *Grafik Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 35.

²⁸W.J.S Oerdawarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 103.

²⁹Undang-Undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bab I Pasal I.

³⁰Direktorat Lalu Lintas Polri, Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009, 12.

dikendalikan oleh seseorang yang sehat akalanya akan membahayakan pemakai jalan yang lain.³¹

3. Pengertian Disiplin Berlalu Lintas

Pengertian disiplin dalam kamus bahasa Indonesia Diknas menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap peraturan atau tata tertib. Djarjo menjelaskan bahwa disiplin sebagai suatu sikap mental yang mengandung kerelaan untuk mematuhi semua ketentuan, peraturan, dan norma-norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Wahyono menyatakan, disatu sisi disiplin merupakan sebuah modifikasi perilaku, baik untuk memperkuat, meningkatkan, maupun untuk memperbaiki seseorang. Disisi lain disiplin mengandung sebuah kontrol terhadap perilaku-perilaku yang telah dibuat berdasarkan peraturan dan standar-standar tertentu.

Lebih lanjut Hurlock, menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu sikap mental dan tingkah laku untuk patuh (to comply) dan taat (to obey) akan norma-norma, aturan, dan nilai-nilai kehidupan yang berlaku sehingga dapat menuntun perilaku individu tersebut sehingga dengan norma yang ada. Seseorang dikatakan disiplin dalam berlalu lintas jika mematuhi peraturan tentang apa yang boleh pada saat berlalu lintas di jalan, baik berbentuk rambu-rambu atau tidak. Prijodarminta menjelaskan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan keterikatan.³²

Sesuai yang tertera dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pada pasal 1 ayat (1) yaitu: lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. Dengan demikian dapat disimpulkan disiplin berlalu lintas yaitu sikap patuh dan taat pengemudi dan pengguna jalan terhadap peraturan dan tata tertib yang ada di ruang lalu lintas.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu sikap atau perilaku seseorang untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku dalam suatu tempat. Dalam hal ini berlalu lintas tentunya masyarakat atau para mengemudi untuk mematuhi, mentaati dan melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan lalu lintas pada saat menggunakan sepeda motor di jalan.

Contoh disiplin berlalu lintas :

- a. Tidak bertelepon saat berkendara
- b. Memakai helm
- c. Menaati rambu-rambu lalu lintas
- d. Tidak melewati jalan untuk pejalan kaki
- e. Sudah memiliki SIM

³¹adip Bahari, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2010), 28.

³²Prijodarminto Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses* (Jakarta: Abadi, 2004), 57.

4. Aspek-Aspek Kedisiplinan Berlalu Lintas

Fatnanta menyatakan bahwa ada 4 aspek kedisiplinan berlalu lintas yaitu:

a. Pemahaman terhadap peraturan berlalu lintas

Pengetahuan tentang peraturan berlalu lintas beserta ketentuan-ketentuannya harus dimiliki dengan baik oleh para pengemudi pada saat menggunakan lalu lintas, hal ini akan berpengaruh terhadap daya tangkap, penyesuaian diri dan daya analogi pengemudi terhadap keadaan atau suasana lapangan maupun kondisi kendaraan yang dikemudikannya. Kemungkinan terjadinya kecelakaan relatif kecil, pengemudi akan tetap tanggap terhadap makna yang terkandung dalam rambu-rambu lalu lintas yang dilihatnya.

b. Kesiapan diri dan kendaraan yang digunakan

Pengemudi diwajibkan memeriksa kendaraannya apakah layak dipakai ke jalan atau tidak, sebelum berkendara di jalan raya. Pengemudi harus juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta normal, agar dalam berkendara tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

c. Tanggung jawab terhadap keselamatan diri dan keselamatan orang lain

Pengemudi sebagai pemakai jalan harus bertanggung jawab menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di jalan. Karena pengemudi yang tidak memiliki kehati-hatian ketika mengendarai bisa mengancam keselamatan orang lain.

d. Kehati-hatian dan kewaspadaan

Sebagai seorang pengendara yang baik seorang pengemudi harus berhati-hati dan waspada dalam berkendara di jalan, dengan kehati-hatian dan kewaspadaan dari pengendara akan dapat menjaga keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya serta dapat mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Hadiwardoyo menyatakan bahwa ada empat aspek dalam perilaku disiplin berlalu lintas yaitu:

1. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab berkaitan dengan kewajiban yang mengikat seseorang untuk mentaati ataupun melaksanakan peraturan yang telah ada, individu dengan perilaku disiplin yang tinggi akan berusaha mentaati dan melaksanakan peraturan yang telah ada dengan penuh tanggung jawab. Misalnya: ketika berada di jalan raya dan ada tanda dilarang parkir, maka dengan rasa bertanggung jawab pengemudi tidak akan parkir di tempat yang telah diberikan tanda tersebut.

2. Murah Hati

Murah hati merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan seseorang karena dorongan hati nurani untuk membantu orang lain dengan tulus, misalnya: ada anak-anak sekolah yang sedang menyebrang jalan lewat zebra cross, maka supir tersebut akan lebih mendahulukan anak-anak sekolah untuk menyeberangi jalan baru kemudian mulai di jalan.

3. Berani Menegakkan Kebenaran

Berani menegakkan kebenaran dengan menciptakan keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Individu dengan perilaku disiplin yang tinggi akan selalu berusaha menciptakan keadaan yang sesuai dengan norma masyarakat. Perilaku pelanggaran disiplin akan ditindak tegas oleh individu yang memiliki keberanian menegakkan kebenaran dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. Misalnya: ketika ada seorang pengendarayang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, maka pengendara lain yang mempunyai perilaku disiplin yang tinggi akan dengan sukarela berusaha mengingatkan bahwa tindakan tersebut tidak benar dan sangat merugikan diri sendiri dan juga orang lain.

4. Bersikap Jujur

Bersikap jujur artinya suatu sikap yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Perilaku yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Individu yang memiliki kedisiplinan yang tinggi akan melakukan perbuatan yang jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, mematuhi segala perturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tanpa bentuk-bentuk kecurangan dalam dirinya maupun tingkah laku sehari-hari.

B. Disiplin Berlalu Lintas Menurut Hukum Islam

1. Tata Cara Berkendara

Melihat perkembangan zaman yang sangat pesat, maka nikmat Allah yang diberikan kepada manusia begitu banyak sehingga mereka pun bisa membuat berbagai macam dan ragam kendaraan. Dahulu mereka hanya mengendarai binatang-binatang berupa keledai, kuda, dan lainnya. Kemudian mereka wujudkan semua itu dalam bentuk kendaraan yang lebih bagus, lebih kuat, lebih indah dan lebih cepat dengan adanya sepeda, motor, mobil, dan lainnya. Allah SWT berfirman :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

“Dan (Dia Telah menciptakan) kuda, bagal (peranakan kuda dengan keledai) dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya.” (QS.Al-Nahl (16):8)

Dengan adanya berbagai macam nikmat tersebut, hendaklah kita sebagai orang-orang yang beriman senantiasa mengingat dan bersyukur nikmat-nikmat tersebut. Bukan hanya mengingat bagaimana nikmat baiknya berkendara, cepatnya sampai ketujuan dan bukan pula karena bagusnyanya kendaraan tersebut. Bahkan kita mengingat dan bersyukur nikmat tersebut. Oleh karena itu, perlu kita ingat bahwa dalam berkendara pun terdapat tata cara, sebagai bukti kesyukuran kita terhadap nikmat-nikmat itu, adapun tata cara berkendara menurut syar’i ketika berkendara yaitu :

a. Mengingat Allah dan Berdoa Saat Berkendara

Seorang dianjurkan ketika awal memulai perjalanan agar membaca do’a sebelum naik kendaraan yang pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad saw kepada umatnya. Hikmahnya agar

kita selalu mengingat Allah yang telah menganugerahkan dan menundukkan bagi kita kendaraan tersebut.

b. Tidak Melanggar Peraturan Ketika Berkendara

Wajib bagi kita untuk menaati peraturan-peraturan yang berlaku ketika berkendara, seperti diwajibkan memakai helm, mempunyai surat-surat yang diperlukan ketika berkendara (SIM & STNK), berhenti ketika melihat lampu merah dan lain sebagainya. Semua hal tersebut adalah kewajiban kita sebagai pengendara dan sebagai bentuk ketaatan kepada penguasa/pemerintah. Menaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada atau dari pada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dengan yang telah diputuskan ulul amri.³³

Hukum syari'at adalah ketentuan Allah yang berkaitan dengan perbuatan subjek hukum berupa melakukan suatu perbuatan, memilih, atau menentukan sesuatu sebagai syarat, sebab, atau penghalang.³⁴ Jika penguasa memerintahkan dilarang menggunakan handphone dan memperhatikan jalan agar pengendara tidak kehilangan konsentrasi saat berkendara, maka wajib bagi seorang muslim menaatinya. Pada asalnya menggunakan handphone, memakai helm, dan menaati rambu-rambu lalu lintas adalah mubah. Namun, ketika penguasa memerintahkannya maka hukumnya berubah menjadi wajib. Jadi, dilarang menggunakan handphone saat berkendara agar pengemudi memiliki konsentrasi penuh saat berkendara agar tidak terjadinya kecelakaan lalu lintas.

c. Tidak ugat-ugalan di jalan raya

Seseorang hendaklah memperhatikan keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain ketika berkendara. Jangan sampai kita menjadi sebab tertumpahnya darah seseorang serta rusaknya harta saudara kita. Jadi, darah dan harta seorang muslim tidak boleh kita ganggu, apalagi ditumpahkan dan dirusak karena harta dan darah seorang muslim memiliki kemuliaan disisi Allah. Dalam pandangan Islam, jiwa manusia sangatlah berharga dan darah setiap manusia adalah suci dimata Allah SWT karena itu setiap jiwa harus dilindungi dan diselamatkan. Tak seorangpun yang berhak mengambil nyawa seseorang bahkan nyawanya sendiripun tidak berhak diambil.³⁵

d. Merawat kendaraan dan tidak membebani melebihi kapasitasnya

Kendaraan adalah nikmat dari Allah, maka hendaklah kita merawatnya dengan baik dan bukan sekedar hanya memakainnya sesuka hati. Sebagaimana binatang ternak yang kita miliki, kita tidak boleh membebani lebih dari kemampuannya. Diantara wujud kesyukuran kita kepada Allah, kita harus menyayangi kendaraan, apakah berupa hewan atau bukan dan tidak membebani lebih kemampuannya. Jadi, seorang muslim tidak boleh membebani kendaraan lebih dari kemampuannya, sehingga ia letih atau rusak. Kita juga harus memperhatikan bensinnya

³³Hasby Ash-Shidieqy, *Al-Islam II* (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), 437.

³⁴Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), 26.

³⁵Pradana Boy ZTF, *Fikih Jalan Tengah* (Jakarta: Hamdalah, 2008), 48.

dan olinya sebagaimana halnya jika kendaraan berupa hewan, maka kita harus memperhatikan makanan dan perawatannya.

- e. Memperlambat laju kendaraan ketika berjalan di jalan yang sempit (lorong) dan mempercepat ketika berjalan di jalan yang lapang

Apabila melakukan perjalanan dalam berkendara hendaklah pelan dalam berjalan karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kecelakaan yang bisa membahayakan keselamatan pengendara. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.³⁶ Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan di air, serta atas permukaan air kecuali rel dan jalan kabel.³⁷ Maka sepantasnya ketika berkendara kita tenang dan tidak terburu-buru, karena terburu-buru itu datanya dari setan.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

“Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan (Maksudnya: ketika kamu berjalan, janganlah terlampau cepat dan jangan pula terlalu lambat) dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai” (QS.Luqman (31):19).

2. Etika Berkendara

- a. Berdoa Kepada Allah SWT sebelum mengemudikan kendaraan

Keselamatan kita hanya Allah yang memberikan. Jika kita ditakdirkan kecelakaan mungkin dengan doa kita dapat menghendaki lainnya dan akhirnya kita selamat di jalan.

- b. Cek persiapan dan kelengkapan berkendara

Cek kondisi kesehatan saat ingin berkendara dan hindari membawa kendaraan ketika sedang sakit atau sedang mabuk untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak terduga dan tidak di sengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.³⁸

- c. Konsentrasi penuh

Bila kesadaran berkurang entah karena sakit, ngantuk, mabok, banyak masalah dan lain sebagainya sebaiknya naik angkutan umum saja. Angkutan adalah perpindahan orang dan atau dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.³⁹ Mengendarai kendaraan bermotor perlu konsentrasi penuh. “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.⁴⁰

³⁶Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (27)

³⁷Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (12)

³⁸Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (24)

³⁹Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (3)

⁴⁰Tim Kreatif Nusa Media, *Undang-Undang Lalu Lintas: UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: Nusa Media, 2018), 78.

d. Patuhi peraturan dan rambu lalu lintas jalan raya

Menerobos lampu merah sebelum lampu hijau menyala sering terjadi. Sama halnya dengan menerobos pintu perlintasan kereta api atau krl dan memutar arah tidak pada tempat yang diizinkan serta berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Semua itu bisa membawa malapetaka yang dahsyat jika kita sedang sial.

3. Keselamatan Berkendara Menurut Hukum Islam

Manusia adalah pelaku kehidupan ini dalam setiap gerak aktifitas sudah pasti manusia lebih mengutamakan keselamatan dan kenyamanan. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan.⁴¹ Dan semestinya pula prinsip dari keamanan dan kenyamanan itu terdapat pula aktifitas berkendara. Keamanan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum atau rasa takut dalam berlalu lintas.⁴² Berkendara adalah suatu kegiatan yang sangat lumrah di zaman ini karena sebuah tuntutan zaman untuk melakukan kegiatan dalam gerak aktifitas yang cepat.

Dalam mengemudikan kendaraan setiap orang diuntut untuk mengutamakan keselamatan agar terciptanya suasana nyaman dan merasa aman dalam berkendara karena keselamatan adalah prioritas dalam berkendara. Ada 2 hal yang perlu diketahui hingga akan tercipta suatu kondisi yang nyaman dan selalu merasa aman dalam berkendara yaitu :

a. Faktor Intern (Dalam)

Faktor intern adalah faktor yang terdapat dalam pribadi pengendara yaitu segala sesuatu yang menunjang hingga terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berkendara ialah sikap ketika berkendara. Perlu diketahui suatu kebijakan yang sangat bagus ketika dituntut untuk mematuhi peraturan lalu lintas yang dibuat oleh pihak berwenang dalam hal ini polisi lalu lintas yang dibuat tidak lain untuk terciptanya rasa aman dan nyaman dalam berkendara.

b. Faktor Ekstern (Luar)

Faktor ini sangat sedikit pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor intern tetapi perlu juga diketahui bahwa faktor ekstern juga perlu dibahas. Biasanya terjadi ketika lingkungannya tempat tinggal atau komunitas memodifikasi kendaraannya. Tetapi yang salah dari modif itu adalah tidak memperhatikan sama sekali terhadap keselamatan dan kenyamanan dalam berkendara. Manusia dianugerahi kemampuan untuk berbuat dan kemampuan manusia ini merupakan kenyataan yang sesuai dengan perbuatan manusia.⁴³ Dua jenis tindakan manusia:

⁴¹Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (31)

⁴²Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1 ayat (30)

⁴³ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, 46.

- 1) Suatu perbuatan yang dilakuka dalam keadaan terpaksa (secara tak sengaja)
- 2) Perbuatan yang manusia bisa memilih untuk melakukannya atau tidak, misalnya tindakan yang dilakukan manusia dengan pengetahuan dan keinginannya tanpa dipaksakan oleh kewajiban tertentu.

Apa yang terjadi pada diri manusia adalah karena apa yang diusahakannya, karena itu manusia memiliki kebebasan untuk berkehendak dan sekaligus bertindak. Dalam pandangan Abd Al-Jabar, manusia diberikan kemampuan untuk bertindak dan kemampuan adalah realitas yang menegaskan kebebasan tindak manusia.⁴⁴ Peraturan yang telah dibuat bukan untuk dilanggar tetapi untuk ditaati karena yakinlah ketika mengendarai kendaraan dengan patuh dan taat pada peraturan, maka rasa aman dan nyaman akan hadir dalam setiap pengendara dan tidak ada peraturan lalu lintas yang dibuat merugikan pengendara.

Berbicara tentang kenyamanan dan keamanan dalam berkendara pasti tidak akan lepas dari berbagai kejadian yang terjadi di jalan. Buktinya berbagai macam kejadian yang menimpa ketika sikap ugal-ugalan atau sama sekali tidak menghiraukan peraturan lalu lintas saat berkendara yaitu terjadinya kecelakaan. Kenyamanan dan keamanan dalam berkendara tidak akan tercipta sendiri tanpa adanya kemauan yang kuat dari diri selaku pengendara. Ratusan orang meninggal dengan sia-sia akibat kecelakaan lalu lintas dan ironisnya pernahkan menyangka bahwa penyebab kecelakaan itu adalah kelalaian pengendara dan fasilitas jalan yang kurang memadai.

Hal yang demikian merupakan hal yang sepele namun berakibat fatal jika sejak sekarang sangat kurang kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas dan sikap yang sewajarnya dalam berkendara. Kalau ternyata sudah berusaha untuk mematuhi peraturan yang ada namun ternyata tetap saja terjadi itu adalah takdir jadi tak ada yang disesali. Seandainya saja mengemudikan kendaraan dengan penuh konsentrasi dan memperhatikan jalan maka kecelakaan yang mengakibatkan terluka atau cacat tidak akan terjadi. Memang sesuatu kesadaran tentang kesalahan biasanya datang terlambat. Selalu belajar dari kejadian-kejadian yang dialami dan selalu berusaha untuk lebih hati-hati.

Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam dan selalu menyuruh umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik. Islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat. Ini adalah salah satu bukti yang sering ditampilkan untuk menjelaskan tentang fleksibilitas hukum Islam.⁴⁵ Fleksibilitas hukum Islam berkaitan erat dengan tujuannya hukum Islam. Said Ramadhan al-Buti menyebutkan tujuan disyariahkannya hukum Islam untuk kepentingan masyarakat umum.⁴⁶ Islam juga memerintahkan umatnya untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh umara (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an maka wajib mengikutinya.

⁴⁴ Abd Al-Jabar, *Syarh Al-Ushul Al-Khamsah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1965), 360.

⁴⁵ ZTF, *Fikih Jalan Tengah*, 8.

⁴⁶ Said Ramadhan Al-Buti, *Dlawabit Al-Maslahah Fi Al-Syariah Al-Islamiyah* (Beirut: Muassah al-risalah, 1977), 12.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisaa’ (4):59).

Peraturan lalu lintas yang dibuat oleh kepolisian mengenai tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar terhindar dari kecelakaan. Peraturan mengenai lalu lintas berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat. Sesungguhnya semua peraturan yang telah dibuat oleh pihak berwenang sangat berguna agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.

Etika yang baik memiliki kedudukan lebih tinggi dari ilmu, karena akhlak atau etika adalah buah hasil darinya. Dalam bahasa lain, sejauh mana ilmu masuk ke dalam diri manusia dapat dilihat dari bagaimanadia beretika. Belajar beretika harus dimulai dari hal-hal yang ringan dan sederhana. Pertama, tanamkan kesadaran bahwa pengguna jalan bukan nya diri sendiri. Menghargai pengendara lain menjadikan mereka mau menghargai sesama pengguna jalan. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalang-halangi kelancaran perjalanan para pengendara tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan.

Menaati peraturan inilah yang dikatakan akhlakul kharimah yaitu nilai dan makna yang secara luas terkandung dalam ungkapan sederhana Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum kendaraan lalu lalang menghiasi jalan raya.

4. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *fiqh* berasal dari faqaha-yafqa-hu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam".⁴⁷ *Fiqh* secara etimologis adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.⁴⁸ Secara terminologis *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *fiqh Siyasah Kontekstuaisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014, 2.

⁴⁸ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994, 21.

syara mengenal amal perbuatan yang di perbolehkan dari dalil-dalilnya yang fashil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Qur'an dan sunnah).⁴⁹

Kata *siyasah* yang bersal dari kata sasa, yang berarti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. *Siyasah* menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik.

Siyasah secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberi batasan *siyasah* adalah " membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka kejalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* "mengatur dan memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang *Fiqh* dan *Siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

5. Ruang Lingkup Fiqh *Siyasah*

Dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, terdapat ihktilaf dari para ulama. Namun perbedaan ini tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap sudut pandang masing-masing ulama, perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi jumlah pembagian masing-masing. Diantaranya adalah klasifikasi *fiqh siyasah* secara menyeluruh, yang disimpulkan oleh Imam al-Mawardi dalam kitab *Ahkam al-Sulthaniyyah*, dirinya memberikan penjelasan bahwa *fiqh siyasah* terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya: *siyasah dusturiyyah* (perundangan), *siyasah maliyyah* (keuangan), *siyasah qada'iyyah* (peradilan), *siyasah harbiyyah* (peperangan), dan *siyasah idariyyah* (administrasi).

Dari beberapa ruang lingkup *fiqh siyasah* diatas, maka menurut Iqbal dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian kelompok, antara lain:

a. *Siyasah Dusturiyyah*

Politik Perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum al-Tasyri'iyah oleh lembaga legislatif, peradilan atau al-Qada'iyyah oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau al-Idariyyah oleh eksekutif.

b. *Siyasah Dauliyyah*

Politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan atau *siyasah harbiyyah* yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan perang, pengumuman perang, tawanan perang dengenjatan senjata.

⁴⁹ Ibid, 22.

c. *Siyasah Maliyyah*

Politik keuangan dan moneter yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan hak-hak politik, pajak dan perbankan. Dengan demikian, *fiqh siyasah* dusturiyah adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsi-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang di sebutkan dalam al-Qur'an dan yang di jelaskan sunnh Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam macam hubungan yang lain.

Siyasah Dusturiyyah dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Yang secara spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintah, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Selain itu juga berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaanya, cara pemilihan, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Selain itu pembahasan mengenai *Fiqh Siyasah Dusturiyah* menurut beberapa tokoh terbagi menjadi beberapa bidang, seperti yang disampaikan oleh Djazuli, dirinya berpendapat bahwa *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terbagi sebagai berikut:

1) Bidang *Siyasah Tasri'iyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah persoalan ahl al-hall wa al-'aqd (majelis shuro), perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Daerah.

2) Bidang *Siyasah Tanfidhiyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang imamah persoalan bai'ah, wuzarah dan waliy al-ahdi.

3) Bidang *Siyasah Qadaiyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang peradilan.

4) Bidang *Siyasah Idariyyah*

Pembahasan terkait dengan *siyasah* ini adalah meliputi pembahasan tentang administrasi dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan daripada Negara, hal ini disebabkan oleh:

- a) Perbedaan antara negara dan pemerintah, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyataannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih konkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk

menjalankan pemerintah.⁵⁰ Sedangkan para fuqaha/ulama menitik beratkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.

- b) Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintah dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintah, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
- c) Kalau fuqaha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang konkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).⁵¹
- d) Fakta sejarah islam menunjukkan bahwa masalah yang pertama yang dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepada negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqaha memberikan perhatiannya yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang kenegaraan lainnya.⁵²
- e) Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara lainnya.⁵³

Walaupun demikian, ada juga diantara fuqaha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu sina, Al-mawardi, Al-gazali, Ibnu rusydi, dan Khaldun. Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata "dasar" dalam bahasa indonesia tidaklah mustahil dari kata *dustur*.

Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi* merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara. Sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.

6. Penerapan Hukum Islam Di Jalan Raya

Dalam hukum Islam negara diberi wewenang untuk mengeluarkan aturan dan regulasi meski tidak ada dalil khusus dan spesifik dalam Al-quran dan Sunnah dengan syarat tidak bertentangan dengan *Nash*. Sekh Abdurrahman Taj mendefinisikan sebagai berikut :

“Hukum kebijakan atau peraturan yang berfungsi mengorganisir perangkat kepentingan negara dan mengatur umat yang sejalan dengan jiwa syariat sesuai dengan dasar-dasar yang universal (kully) serta dapat merelasisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafsili* dan *juz’i* dalam Al-qur’an dan Sunnah.

⁵⁰ Muchtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Alumni, Bandung, 1971, 157.

⁵¹ Ahmad Djazuli, Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah", Jakarta, Kencana, 2004, 49.

⁵² Ibid., 49.

⁵³ Wirjonno Projodikoro, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Bandung, PT.Eresco, 1971, 17-18.

Taj kemudian membedakan antara siyasah syar'iyah dengan siyasah wadh'iyah. Yang pertama ialah segala hukum, peraturan atau perundang-undangan untuk mengatur persoalan umat yang bersumber atau bertumpu pada dasar agama Islam guna menciptakan kemaslahatan serta menghindari kemudharatan. Sedangkan yang kedua adalah segala peraturan atau perundang-undangan yang dibuat oleh manusia untuk mengatur persoalan umat, dimana peraturan dan perundang-undangan tersebut bersumber dari bertumpu pada urf (adat kebiasaan), pengalaman, pandangan para pakar dan sebagainya tanpa ada pertalian dengan sumber hukum Islam.⁵⁴

Oleh karena itu, selama peraturan perundang-undangan itu dikeluarkan berdasarkan untuk kemaslahatan kita semua maka kita wajib menaatinya peraturan itu dikeluarkan oleh pemimpin. Baik sumbernya dari nash atau adat setempat atau kebutuhan masyarakat. Semuanya dianggap sah dan Islami. Tidak bisa menolak aturan yang tertera dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu salah satunya disiplin berlalu lintas dengan alasan tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah yang mewajibkan harus disiplin pada peraturan yang berlaku. Jika tidak taat maka akan terjadi kekacauan yang berakibat kecelakaan fatal.

Aturan berlalu lintas dalam Islam secara tidak langsung diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi As-Sayyid Nad yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya Mausuu'ul Aadam al Islamiyah yang diterjemahkan kesalam basa Indonesia Ensklopedia Adab Islam menurut Al-Qur'ah dan Sunnah yaitu:⁵⁵

- a. Niat yang benar yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan Ridho dari Allah SWT.
- b. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan.
- c. Berjalan secara biasa tidak terlalu cepat.
- d. Tidak menoleh kebelakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan.

⁵⁴ Abdurrahman taj, *Asy-Syar'iyah wa al-fiqh al-islami*, Mesir: Dar at-fa'lif, 1935. 21

⁵⁵ S, Yuwono, Jurnal, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'an, Departemen Agama, 2015, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro.
- Affandi, Muchtar, 1971, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Alumni, Bandung.
- Al-Jabar, Abd, 1965, *Syarh Al-Ushul Al-Khamsah*, Kairo: Maktabah Wahbah.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, 1952, *Al-Islam II*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Bahari, Adip, 2010, *Tanya Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas*, Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Burgin, Burhan, 2007, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Boy, Pradana, 2008, *Fikih Jalan Tengah*, Jakarta: Hamdalah.
- Djajoesman, 1976, *Grafik Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djazuli, 2011, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Cet Ke-4, Jakarta: Kencana.
- Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Bandung: PT. Grafindo Persada.
- Kerlinger, 2006, *Asas-Asas Penelitian Behaviour*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Martono, Nanang, 2015, *Metode Penelitian Sosial Konsep-Konsep Kunci*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Muhadjir, Noeng, 1996, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sirasi.
- Moenir, 2010, *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Projodikoro, Wirjonno, 1971, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Bandung, PT. Eresco.
- Ramadhan al-Buti, Said, 1977, *Dlawabit al-Maslahah fi al-syariah al-Islamiyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Cetakan 1, PT. Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Soegeng, Prijodarminto, 2004, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, Jakarta: Abadi.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-Undangan Lalu Lintas*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Sohari, Ahmad. Sanusi, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugyiono, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukarna, Uma, 2007, *Metode Analisis Data*, Jakarta: Kencana.
- Susiadi, AS, 2014, *Metodologi Penelitian*, Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung.
- Sutopo, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta: UNS.
- Sutrisno, Hadi, 1994, *Metode Research*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Syarif, Muzar, Ibnu, 2008, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Erlangga.
- Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Tras.
- W.J. Soerdawarminta, 2002, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Zainal, Abidin, Amirullah, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka.

Wawancara

Aditya Mirza, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 5 Mei 2021.

Anwar, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 6 Mei 2021

Brigadir Edo Miko Arnando, Wawancara dengan anggota unit laka lantas Polres Lampung Tengah, Pada tanggal 3 Mei 2021.

Diva Aprisa, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Fakhri. K.S, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 5 Mei 2021.

Febriyani, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Hartono, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Husein Abdillah, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 5 Mei 2021.

Khoiri Muzamil, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Nada Sahira, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada Tanggal 7 Mei 2021.

Nofrizal, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Rizky, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 7 Mei 2021.

Rosmiati, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 5 Mei 2021.

Sulistina, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 5 Mei 2021

Sumarti, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 6 Mei 2021.

Tini, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 6 Mei 2021.

Zarha Sabet, Wawancara Masyarakat Lampung Tengah, Pada tanggal 6 Mei 2021.

Skripsi

Faishal Abdoe, *Tinjauan Hukum Islam Secara Komprehensif Terhadap Peraturan menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Univesitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Armansyah, *Dampak Negatif dan Sanksi Pemakaian Telepon Seluler Pada Saat Mengemudikan Kendaraan Analisis Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Menurut Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Rosdiana Harahap, *Analisis Fiqh Siyasah Mengenai Disiplin Berlalu Lintas Pasal 107 Ayat 2 UU No. 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Kemaslahatan Studi Kasus di Jalan Pasar VII Tembung/Simpang Jodoh*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, 2019.

Adjie Bagas Putra Koneri, *Penegakan Hukum Pidana Pelanggaran Pasal 106 jo Pasal 283 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Palembang*, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2018.

Jurnal

Muhammad, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 16, No. 1, 2016.

Elsania Natasya Susilo , *Penegakan Hukum Terhadap Pengguna GPS Saat Mengendarai Kendaraan*, Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, 2020.

Eva Iryani, Hukum Islam, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol.17, No.2 Tahun 2017.

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dokumentasi

Dokumentasi Data Kecelakaan Lalu Lintas Polres Lampung Tengah Tahun 2020, April 2021

Sumber On-line

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_resor

